BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi merupakan suatu aktivitas pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan transaksi keuangan yang menghasilkan laporan keuangan (Hamzah dan Kustiani, 2014). Adapun salah satu cabang dari ilmu akuntansi ialah Akuntansi Pemerintahan. Akuntansi pemerintahan adalah aplikasi akuntansi dalam bidang keuangan, khususnya pada tahapan pelaksanaan anggaran termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat sementara maupun yang lebih permanen pada semua tingkatan dan satker pemerintahan (Kustadi Arinta, 1996).

Adapun akuntansi pemerintahan secara khusus memiliki tujuan berikut:

1. Akuntabilitas

Selain memiliki fungsi ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku, akuntabilitas memiliki fungsi lebih luas dari sekedar ketaatan terhadap peraturan perundangan yang berlaku yaitu memperhatikan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif dan ekonomis. Dengan demikian tujuan utama dari akuntabilitas ialah menekankan kepada setiap pengelola atau setiap

manajemen agar dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan cara menyampaikan laporan keuangan.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintah memungkinkan pemerintah untuk menjalankan fungsi administratif dengan melakukan perencanaan berupa penyusunan APBN dan strategi pembangunan lain.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan dibuat untuk memungkinkan diadakannya pengawasan pengelolaan keuangan Negara dengan lebih mudah oleh aparat pemeriksa seperti BPK, ITJEN, dan BPKP.

Adapun dalam mengatur pelaksanaan akuntansi pemerintah agar berjalan dengan baik, pemerintah menciptakan sebuah sistem yang disebut Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat yang mengandung sekumpulan prosedur manual dan prosedur terkomputerisasi yang dimulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah pusat dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Kemudian LKPP tersebut diaudit terlebih dahulu oleh pihak BPK sebelum disampaikan kepada DPR sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan APBN. Adapun komponen – komponen penyusun laporan keuangan pemerintah pusat terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Pemerintah, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.2 Akuntansi Anggaran

Menurut PSAP 02 Par.18 Akuntansi Anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Akuntansi anggaran dilaksanakan pada saat anggaran telah disahkan dan dialokasikan yang dimana anggaran dikatakan sah pada saat terbitnya Undang-Undang APBN.

APBN merupakan dokumen gabungan anggaran dari seluruh anggaran pendapatan dan belanja kementerian negara/lembaga pada tingkat pemerintah pusat. Selanjutnya, anggaran ini akan dialokasikan kepada seluruh kementerian negara/lembaga dalam bentuk dokumen anggaran milik kementerian negara/lembaga dan satker yang berada dibawahnya atau yang lebih dikenal dengan DIPA.

Adapun anggaran memiliki tujuan sebagai berikut: untuk menyatakan sasaran pemerintah secara jelas dan formal, untuk menyampaikan harapan pemerintah kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dapat didukung, dimengerti dan dilaksanakan, untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi inefisiensi dalam mencapai tujuan, untuk melakukan koordinasi cara apa yang akan digunakan dalam memaksimalkan sumber daya, dan untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok. Selain daripada itu, Anggaran memiliki fungsi sebagai fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi koordinasi dan fungsi penilaian dan pedoman kinerja.

2.3 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan salah satu komponen laporan keuangan pemerintah yang memberikan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan yang dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah, serta memberikan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu rentang waktu tertentu. Menurut PSAP Nomor 02, tujuan standar Laporan Realisasi Anggaran ialah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan serta memberikan informasi secara berdampingan tentang realisasi dan anggaran entitas pelapor.

Suatu entitas pelapor wajib menyampaikan Laporan Realisasi Anggaran selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berjalan dengan struktur dari Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pendapatan – LRA, belanja, transfer, surplus atau defisit – LRA, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pembiayaan neto, dan Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA) dengan memuat informasi sebagai berikut: Nama entitas pelaporan, Cakupan entitas pelaporan, Periode yang dicakup, Mata uang pelaporan, dan Satuan angka yang digunakan.

Adapun Laporan Realisasi Anggaran memiliki tujuan sebagai berikut yaitu menetapkan dasar-dasar penyajian LRA untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan dan memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya untuk

menunjukkan besarnya persentase atau tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati oleh pihak legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Laporan Realisasi Anggaran juga mempunyai manfaat berupa menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan dua cara yaitu menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi, dan menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

2.4 Pengertian dan Klasifikasi Pendapatan – LRA

Pendapatan adalah kenaikan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menambah ekuitas. Pendapatan dapat dibedakan menjadi 2 yaitu Pendapatan LO dan Pendapatan LRA dengan defenisi sebagai berikut :

1. Pendapatan LO merupakan hak pemerintah pusat atau daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun

anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menjadi salah satu aspek utama LRA karena menyangkut dana sebagaimana tercantum dalam APBN, dengan demikian pos pendapatan LRA membutuhkan penganggaran, pengawasan dan pertanggung jawaban secara matang. Adapun pendapatan – LRA dibagi menjadi 3 yaitu Pendapatan Perpajakan, Pendapatan Penerimaan bukan Pajak dan Pendapatan Hibah.

2.5 Pengertian dan Klasifikasi Belanja

Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Belanja Negara adalah kewajiban pemerintah pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Berdasarkan PSAP 02 Belanja Negara adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode berjalan yang pembayarannya tidak akan diperoleh kembali oleh pemerintah.

Terdapat 8 (delapan) kategori jenis belanja negara, yaitu :

2.5.1 Belanja Pegawai

Pengeluaran yang merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

2.5.2 Belanja Barang

Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan (Syaiful, 2005). Belanja barang digunakan untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran yang sudah dikeluarkan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dijual maupun tidak dijual serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan

2.5.3 Belanja Modal

Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan dalam rangka untuk menambah aset tetap atau inventaris yang memiliki manfaat lebih dari satu periode akuntansi, yang didalamnya termasuk pengeluaran biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset (Syaiful, 2005). Anggaran belanja yang digunakan untuk memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (Satu) periode akuntansi serta telah melebihi batas minimum kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah

2.5.4 Belanja Bunga

Belanja Bunga merupakan pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga atas pokok utang yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang (Suryanovi Sri, 2014).

2.5.5 Belanja Subsidi

Pengeluaran yang diberikan pemerintah daerah kepada BUMN/BUMD atau pihak ketiga lainnya yang melakukan produksi dan impor barang serta menyediakan jasa untuk dijual dan diserahkan dalam rangka memenuhi hajat hidup orang banyak agar harga jualnya dapat dijangkau masyarakat

2.5.6 Belanja Hibah

Belanja hibah adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa. kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah

2.5.7 Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

2.5.8 Belanja Lain-lain

Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja pembayaran utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

2.6 Kinerja Anggaran dan Laporan Realisasi Anggaran

Anggaran adalah hasil perencanaan yang berupa daftar mengenai beragam kegiatan terpadu yang penerimaan dan pengeluarannya dinyatakan dalam satuan

uang dalam jangka waktu tertentu (Hasanah dan Fauzi, 2017). Pada umumnya anggaran disusun berdasarkan pengalaman masa yang lalu dan perhitungan pada masa depan, sehingga hal ini dapat menjadi pedoman kerja bagi setiap bagian dalam organisasi untuk menjalankan kegiatannya.

Anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai dengan cara seberapa baik pencapaiannya terhadap dengan anggaran yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, setiap anggaran perlu dilakukan evaluasi agar kedepannya dapat diperbaiki. Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.

Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK 02/2021 Pasal 27 ayat (4), Evaluasi Kinerja Anggaran tingkat Kementerian/Lembaga dilakukan atas: Sasaran strategis Kementerian/Lembaga, Indikator kinerja sasaran strategis Kementerian/Lembaga, Sasaran program, Indikator kinerja program, Output program dan Dinamika perkembangan keadaan termasuk perubahan kebijakan pemerintah.